

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas terkait laporan keuangan salah satunya mencakup penyajian laporan keuangan. Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan (Mulyana, 2006). Reformasi dan regulasi yang terkait dengan penyajian laporan keuangan daerah, ditandai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Permendagri No. 21 tahun 2010 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah menyatakan setiap akhir tahun periode anggaran pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan Laporan Keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Keuangan serta Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD. Semakin baik penyajian laporan keuangan akan berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas publik, dalam hal ini pengguna informasi dalam laporan keuangan akan memperoleh informasi yang berkualitas (Wahida, 2015).

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Steccolini, 2002). Pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Permendagri No. 21 Tahun 2010). Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam organisasi sektor publik dapat ditingkatkan dengan dibuatnya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk:

- (a) mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang

transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, (b) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada *stakeholder* adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah (Somad, 2016). Menurut Aliyah dan Nahar (2012) agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani (2010) yang memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (survey pada seluruh dinas pemerintahan kota Bandung). Hasil yang diperoleh penelitian ini adalah (1) Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditemukannya kasus korupsi atau penggelapan uang pengadaan alat peraga tahun 2012 senilai Rp 6 miliar untuk 121 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan tahun 2013 senilai Rp 2,1 miliar untuk 43 Sekolah Dasar Negeri (SDN) se Kabupaten Ponorogo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) (<http://surabaya.tribunnews.com> diakses pada 31 Mei 2018). Kasus korupsi tersebut, berdasarkan dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan masih terdapat kelemahan. Dilihat dari sisi penyajian laporan keuangan yang seharusnya digunakan untuk menjamin para pengguna dan pihak otoritas penguasa atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dilaksanakan karena adanya kasus korupsi ini masih terdapat kelemahan. Hal ini berarti masih terdapat kendala dalam menyajikan laporan keuangan dan aksesibilitasnya. Sehingga perlu dianalisis lebih jauh tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu variabel dan objek yang diteliti. Variabel yang berbeda dengan penelitian lainnya yaitu Penyajian Neraca Daerah yang digantikan dengan Penyajian Laporan Keuangan, dimana penelitian terdahulu untuk mengetahui persepsi atau pendapat responden mengenai Neraca Daerah dan penelitian ini untuk mengetahui persepsi atau pendapat responden terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan perbedaan hasil beberapa penelitian dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk menguji lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo”**

1.2. Perumusan Masalah

Dengan berdasarkan teori dan bukti yang ditemukan pada penelitian terdahulu serta berdasarkan uraian latar belakang ada tiga pertanyaan yang dapat dirumuskan pada permasalahan penelitian ini:

1. Bagaimana Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016?
2. Bagaimana Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016?
3. Bagaimana Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.

1.3.2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi serta memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun bagi akademika lainnya khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Objek yang diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

c. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai penyajian laporan keuangan, aksesibilitas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Ponorogo. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat di masa depan.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi sebagai pertimbangan dan pemikiran untuk memutuskan masalah baru dalam penelitian selanjutnya

